

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemanfaatan teknologi informasi dan Internet sudah menjadi hal wajib yang harus dilakukan pemerintah dalam memberikan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat meningkatkan daya saing dan kinerja pemerintah dalam hal penyebaran informasi dan perampingan kinerja administratif dalam memberikan layanan (Putra & Atmaja, 2021). Pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada dasarnya pemerintahan kelurahan merupakan salah satu bagian dari struktur pemerintahan Indonesia yang terendah dan berada di dalam lingkup wilayah kerja pemerintah daerah. Sebagai unsur pemerintahan yang terendah dan langsung berhubungan dengan masyarakat, urusan pemerintahan yang dilakukan di kelurahan adalah urusan pembantuan dari pemerintah pusat maupun daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), sehingga wewenang pemerintah kelurahan sangat strategis, secara kelembagaan, kebijakan dan administratif pemerintahan dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut.

Desa sebagai bagian dari wilayah bersifat otonom kreatif. Bahkan dalam batas-batas pemerintahan sendiri adat, desa dapat membangun kapasitas ekonomi dan keuangannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk) dan sumber daya modal. (uang) dan sumber daya alam. (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial (Tomisa & Syafitri, 2020). Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau kelurahan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau kelurahan serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada kelurahan untuk melaksanakan tugas tertentu. Salah satu tugas pembantuan yang diberikan kepada Kelurahan adalah Program Data Profil Kelurahan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Profil desa dan kelurahan harus dapat berfungsi sebagai

sumber informasi potensi desa dan kelurahan. Oleh karena itu, data profil haruslah tersedia, lengkap dan akuntabel. Ketersediaan, kelengkapan dan akuntabilitas data merupakan indikator evaluasi terhadap kualitas data profil.

Profil desa dan kelurahan merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan (Devi & Hidayati, 2021). Namun fakta yang ditemukan dilapangan, program Data Profil Desa dan Kelurahan belum berjalan secara efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Ketersediaan data yang lengkap, benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan merupakan suatu elemen penting dalam perencanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dari data yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa publikasi mengenai data desa/kelurahan yang dilakukan oleh berbagai instansi seringkali kurang akurat dan berbeda – beda, serta tidak terintegrasi dengan baik sehingga masyarakat menjadi bingung mana data yang akurat.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa selama ini data profil kelurahan Tirtomoyo, KecamatanTirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah masih belum bias terpenuhi, banyak data yang belum terisi dan data yang terisi pun kurang valid. Karena dalam pengisian data profil hanya mengacu pada data SIAK offline yaitu basis data kependudukan yang tidak update di setiap perubahan data. Selain itu kurangnya staf di kelurahan, juga kurangnya penggalian data dari instansi yang ada. Banyak instansi di wilayah kelurahanTirtomoyo yang apabila di libatkan akan dapat mempercepat proses pengumpulan data, seperti Rukun Tetangga (RT), kader balita dan posyandu, tempat tempat pendidikan, Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Dengan tidak terpenuhinya data profil secara valid, setiap ada permintaan data sangat kesulitan untuk memenuhi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah *bagaimanakah mekanisme validasi dan pemenuhan data profil kelurahan Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri?*.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme validasi dan pemenuhan data profil kelurahan Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis adalah diharapkan kegiatan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan keilmuan tentang pelaksanaan pemenuhan data profil kelurahan.
2. Manfaat praktis adalah diharapkan kegiatan penelitian dapat menjadi salah satu masukan kepada kegiatan penelitian berikutnya dan kepada pembuat kebijakan yang terkait dengan masalah mekanisme validasi dan pemenuhan data profil kelurahan

## **E. Definisi Konsep**

Dalam penelitian ini yang dimaksud Profil Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi kelurahan. Namun dalam penelitian ini terdapat parameter yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, parameter tersebut terdiri atas :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

## **F. Kajian Teori**

Penelitian ini menggunakan konsep mekanisme validasi dan teori kebijakan publik menurut Edward III (1980). Hal demikian berkaitan dengan konsep mekanisme validasi yang diterapkan oleh pemerintah desa guna mengumpulkan data untuk pemenuhan profil desa, hal ini berarti berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa guna dapat menampilkan ataupun memberikan keterbukaan informasi seputar desa pada profil desa mereka. Dimana teori kebijakan publik mengarah dalam kebutuhan menjawab akan fenomena yang dijadikan topik bahasan dalam penelitian ini.

### **a. Mekanisme Validasi**

Kata mekanisme berasal dari kata mekanis yang berarti cara kerja yang digunakan untuk operasi dalam melaksanakan sesuatu yang diperlukan agar manfaat dapat diperoleh dengan lancar. Mekanisme adalah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dengan menggunakan seperangkat aturan serta alur komunikasi dan pembagian tugas menurut profesionalisme. Mekanisme adalah kata yang digunakan dalam berbagai bidang. Artinya mungkin berbeda-beda tergantung pada bidang penerapannya. Secara sederhana, mekanisme adalah serangkaian peristiwa yang saling berhubungan dan mempunyai efek yang sama (Isnanto, 2023).

Sedangkan Validasi adalah istilah yang merujuk pada pengujian terhadap kebenaran akan sesuatu. Validasi ini dapat dilakukan dalam bidang apa saja dalam kehidupan, tapi kerap kali berhubungan dengan pelaksanaan penelitian. Pada penelitian, ukuran validasi ini sangat penting untuk mencapai pendekatan kebenaran suatu penelitian. Hal ini membuat keilmiahannya penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Validasi merupakan kegiatan untuk membuktikan suatu instrumen. Validasi adalah tindakan pembuktian. Istilah ini kerap kali dibandingkan dengan kata validitas. Validitas sendiri adalah sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum. Validitas bisa disebut juga dengan kesahihan (Abdi, 2023).

Secara etimologis, validasi adalah istilah yang berasal dari kata validation dalam bahasa Inggris, yang memiliki makna sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dalam

penelitian, validasi data merupakan bagian penting yang berhubungan erat dengan penanganan teknik pengumpulan data saat kamu berada di lapangan. Hal ini berguna untuk mengumpulkan informasi, menganalisis data, atau mempersiapkan diri untuk menyajikan data. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai, di mana tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan mampu mencapai hasil yang diinginkan (Abdi, 2023).

#### **b. Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah suatu pernyataan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum mengenai penetapan ruang lingkup yang menentukan arah umum seseorang untuk bergerak. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi landasan pelaksanaan kerja, kepemimpinan, dan cara kerja. Kebijakan dapat berupa keputusan yang dipertimbangkan secara hati-hati oleh para pengambil keputusan senior, bukan aktivitas yang berulang, rutin, dan terprogram yang dikaitkan dengan aturan pengambilan keputusan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan atau pilihan tindakan yang mengatur secara langsung pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk mencapai kepentingan umum (Giantara & Amiliya, 2021).

Kebijakan yang berkaitan dengan publik disebut kebijakan publik. Masyarakat lahir dari kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pembuat kebijakan publik disebut pemangku kepentingan. Stakeholder dalam pengambilan kebijakan publik adalah pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip kepentingan masyarakat. Kebijakan publik diartikan sebagai suatu hubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari hasil akhir kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Desrinelti, Afifah, & Gistituati, 2021).

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, salah satunya model implementasi menurut George Edward III dalam Takaluhude dkk.,

(2022) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu :

#### A. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Takaluhude dkk., (2022) komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Takaluhude dkk., (2022) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

#### B. Sumberdaya

Edward III dalam Takaluhude dkk., (2022) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Takaluhude dkk., (2022) bahwa sumberdaya tersebut meliputi :

##### 1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Takaluhude dkk., (2022) menyatakan bahwa “ Mungkin sumberdaya yang paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf ”. Edward III dalam Takaluhude dkk., (2022) menambahkan “ Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten urutan implementasi dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumberdaya untuk melakukan pekerjaan efektif, implementasi tidak akan efektif “.

##### 2. Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Takaluhude dkk., (2022) menyatakan dalam kesimpulan studinya, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Takaluhude dkk., (2022) menyatakan bahwa

terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Takaluhude dkk., (2022) menyampaikan bahwa terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

### 3. Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Takaluhude dkk., (2022) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implelementasi kebijakan.

### 4. Sumberdaya Kewenangan

Menurut Edward III dalam Takaluhude dkk., (2022) menyatakan bahwa : Kewenangan ( authority ) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Takaluhude dkk., (2022), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat Keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

## C. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.



Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

#### D. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);



4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan atau batasan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dirumuskan sebagai penelitian untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya (Nawawi, 1996) Atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dan

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini adalah bahwa pemecahan masalahnya dengan jalan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan deskriptif memusatkan perhatian pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya (Nawawi, 1996). Atau mencari fakta dengan penafsiran yang tepat, bertujuan atau untuk mencari gambaran yang sistematis dan akurat. Dirumuskan pula sebagai metode untuk menggambarkan sifat sesuatu keadaan sementara pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala.

Jadi penelitian deskriptif berusaha memecahkan masalah dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor kelurahan Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilaksanakan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000).

Wawancara dalam penelitian kualitatif pada umumnya tidak dilakukan secara terstruktur ketat dan dengan pertanyaan tertutup seperti di dalam penelitian kuantitatif, tetapi dilakukan secara tidak terstruktur atau sering disebut sebagai teknik wawancara mendalam karena peneliti merasa belum mengetahui hal yang diinginkan.

Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan *open ended*, dan mengarah pada kedalaman informasi. Maksud dari wawancara mendalam adalah mendapatkan data yang terinci, sejujurnya dan mendalam, serta dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang sedang dijelajahi (Sutopo, 1990).

Tahapan dalam metode wawancara adalah sebagai berikut :

- 1) Penentuan siapa yang diwawancarai. Artinya peneliti harus bisa mewawancarai informan yang benar, lengkap dan mendalam.
- 2) Persiapan wawancara. Setelah penentuan informan, peneliti perlu mempersiapkan diri untuk memahami pribadi dan peran informan dalam konteksnya, sehingga bila perlu peneliti menyesuaikan diri dengan karakter dan posisi informannya agar tidak terjadi kesan yang mungkin kurang tepat, sehingga bisa berakibat hanya mendapatkan informasi yang kurang sesuai dengan yang sebenarnya diharapkan.
- 3) Langkah awal. Pada pertemuan dengan informan, peneliti perlu benar-benar memahami konteksnya agar suasana wawancara bisa berjalan dengan lancar, oleh karena itu perlu menjalin keakraban dengan informan yang dihadapinya.
- 4) Mengusahakan agar wawancara bersifat produktif irama wawancara perlu dijaga supaya tetap santai tetapi berjalan lancar. Peneliti jangan banyak memotong pembicaraan dan berusaha menjadi pendengar yang baik tetapi kritis. Peneliti jangan banyak bicara supaya bisa belajar lebih banyak dalam kelancaran prosesnya. Tunjukkan kesan bahwa yang dinyatakan dalam informan benar-benar merupakan sesuatu yang penting dan berharga, sehingga ia tetap berminat dan sungguh-sungguh dalam memberikan informasi.
- 5) Penghentian wawancara dan mendapat kesimpulan. Bila peneliti menangkap gejala kelelahan pada informan maupun peneliti

sendiri, maka ia wajib berfikir apakah sudah waktunya peneliti bisa menghentikan wawancara dan sudah bisa menarik kesimpulan dari semua informasi yang telah diperolehnya (Sutopo, 1990 ).

Alasan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah sebagai berikut :

- 1) Wawancara dapat mengungkapkan keterangan, informasi yang sedalam-dalamnya dari informan.
- 2) Wawancara dapat dilaksanakan berkali-kali sesuai dengan keperluan penelitian mengenai kejelasan masalah yang akan dikaji.
- 3) Wawancara dapat dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna menggali informasi yang diperlukan.

#### b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data (mencari data) mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legger dan agenda. (Suharsimi Arikunto, 1998)

Penggunaan metode ini adalah sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji, dengan alasan dilihat dari waktu, biaya dan tenaga, metode ini sangat efektif dan efisien. Sebab cukup hanya melihat atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Arsip atau dokumen tersebut adalah data tentang data profil kelurahan Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. Untuk itu penggunaan arsip atau dokumen dilakukan dengan suatu analisis kritis.

#### 4. Keabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap penelitian harus memilih dan menentukan cara-cara

yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Validitas data merupakan suatu yang harus selalu diupayakan dalam setiap kegiatan penelitian guna menjamin kemantapan dan tafsiran makna penelitian. Dalam penelitian ini untuk mewujudkan validitas data digunakan teknik Triangulasi.

Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data dan triangulasi metode.

a. Triangulasi Data

Triangulasi data (sumber) adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber data yang berbeda-beda. Dalam hal ini peneliti berusaha membandingkan data tertentu yang diperoleh dari berbagai sumber data, misalnya berbagai informan, peristiwa, peralatan fisik, arsip dan dokumen serta kondisi tempat atau lokasi.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah upaya mengecek tingkat kesahihan data penelitian dengan cara membandingkan data-data sejenis yang dikumpulkan dengan teknik dan metode pengumpulan data yang berbeda.

Adapun langkah-langkah atau prosedur pengecekan data melalui teknik triangulasi, menurut Moleong (1989) adalah sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dilakukannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berlainan.

## 5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul dan diuji validitas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data. Analisis data menurut Patton yang dikutip Moleong (2000) adalah “Proses mengatur urutan data, mengkoordinasi-kannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar”. Selanjutnya menurut Bogdam dan Taylor dalam bukunya Lexy J. Moleong (2000) mendefinisikan “Analisis data yaitu suatu proses yang memperinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesia atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu”.

Menurut pendapat Moleong (2000) dengan mensintesis kedua definisi tersebut menjadi “Analisis data adalah proses mengatur urutan data ke dalam pola. Kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Dalam jenis penelitian ini, terdiri dari tiga komponen yang dianggap penting. Ketiga komponen tersebut adalah : reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (HB. Sutopo, 1990 ). Pelaksanaan ketiga komponen utama proses analisis data penelitian kualitatif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis data, yaitu suatu kegiatan analisis data yang dilaksanakan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan akhir. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian dan sebenarnya telah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pengumpulan data, yaitu pada penyusunan proposal penelitian dan akan berakhir setelah laporan akhir penelitian ini selesai ditulis.

### b. Penyajian data

Sajian data merupakan rakitan kalimat atau rakitan informasi-informasi yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan atau melakukan tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Sajian data ini dapat meliputi berbagai jenis matrik, skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan tabel yang dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dimungkinkan sudah akan dapat mengerti dan memahami arti dari hal-hal yang ditemui sejak awal pengumpulan data dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai informasi, akan tetapi peneliti tetap akan bersifat terbuka dan skeptis sehingga konklusi-konklusi yang diperoleh akan semakin jelas, meningkat secara eksplisit dan akan memiliki landasan yang semakin kuat. Dalam hal ini kesimpulan akhir tidak akan dirumuskan sampai proses pengumpulan data terakhir. Kesimpulan-kesimpulan sementara yang dirumuskan dalam pelaksanaan analisis data ini sangat memungkinkan untuk dilakukan verifikasi, gerak pengulangan, dan penelusuran data kembali dengan cepat apabila timbul pemikiran kedua yang melintas dengan cara melihat kembali catatan-catatan yang ada.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Umum**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kelurahan Tirtomoyo terletak di wilayah Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. Luas wilayah Kelurahan Tirtomoyo adalah 1663,2 Ha yang terbagi menjadi 10 Lingkungan, yaitu :

- a. Lingk Tirtomoyo
- b. Lingk Sembung
- c. Lingk Ngeplak
- d. Lingk Pertiingen
- e. Lingk Dawung
- f. Lingk Cangkring Lor
- g. Lingk Cangkring Kidul
- h. Lingk Bugel
- i. Lingk Bedngin
- j. Lingk Wonolopo

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Tirtomoyo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Hargantoro Kecamatan Tirtomoyo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngambarsari Kecamatan Karangtengah
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Hargantoro Kecamatan Tirtomoyo
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ngarjosari Kecamatan Tirtomoyo.

Lahan atau areal tanah yang berada di Kelurahan Tirtomoyo yang luasnya mencapai 1663,2 Ha dipergunakan untuk pemukiman penduduk, persawahan dan keperluan lainnya. Karena sebagian besar penduduk Kelurahan Tirtomoyo adalah sebagai petani, maka lahan merupakan salah satu faktor utama untuk

melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Secara jelas mengenai data penggunaan lahan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Luas wilayah menurut tata guna lahan di Kelurahan Tirtomoyo tahun 2023.

No	Jenis Lahan	Luas (ha)	Persentase
1.	Luas lahan sawah		
	a. Irigasi teknis	3	0,180
	b. Irigasi ½ teknis	96,7	5,814
	c. Irigasi sederhana	32,2	1,936
	d. Tadah hujan	8	0,481
2.	Tanah kering/bukan sawah		
	a. Bangunan dan pekarangan	231,1	13,895
	b. Tegalan/ladang	699,2	42,039
	c. Hutan negara	556	33,430
	d. Kuburan	2	0,120
	e. Lapangan olahraga	1,6	0,096
3.	Lahan tandus/sungai/jalan	33,4	2,008
	Jumlah	1663,2	100 %

## 2. Kondisi Demografi

Jika dilihat pada data monografi, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan jumlah usia produktif atau usia kerja lebih banyak daripada usia belum produktif dan usia ketergantungan atau usia lanjut.

Untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Tirtomoyo, baik dilihat dari pembagian usia maupun jenis kelamin yang dapat menggambarkan jumlah usia produktif, non produktif maupun besarnya angka ketergantungan penduduk di Kelurahan Tirtomoyo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kelurahan Tirtomoyo tahun 2023.

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4 tahun	194	195	389
2	5 – 9 tahun	276	302	578
3	10 – 14 tahun	218	231	449
4	15 – 19 tahun	298	278	576
5	20 – 24 tahun	304	235	539
6	25 – 29 tahun	315	297	612
7	30 – 39 tahun	353	367	720
8	40 – 49 tahun	337	330	667
9	50 – 59 tahun	332	344	676
10	60 tahun ke atas	249	247	487
	Jumlah	2.867	2.826	5.693

Berdasarkan tabel di atas penduduk Kelurahan Tirtomoyo dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur, yaitu :

- a. Kelompok usia belum produktif, yaitu usia antara 0 – 14 tahun yang berjumlah 1416 jiwa atau 24,87%
- b. Kelompok usia produktif, yaitu usia antara 15 – 55 tahun yang berjumlah 3452 jiwa atau 60,63%.
- c. Kelompok usia non produktif, yaitu usia di atas 56 tahun yang berjumlah 825 jiwa atau 14,49%.

### 3. Kondisi Sosial Budaya

#### a. Pendidikan

Salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi keadaan sosial budaya suatu wilayah adalah faktor pendidikan, karena pendidikan memegang peranan dalam modernisasi masyarakat, dalam arti mengubah sikap, pandangan serta pola pikir yang tradisional dan sulit untuk

menerima hal-hal yang bersifat baru menjadi sikap yang lebih terbuka dan maju.

Dengan pendidikan sumber daya manusia suatu daerah akan bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga dengan sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan akan mampu untuk melahirkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru yang kreatif untuk membangun daerahnya, hal ini tentunya dengan dukungan faktor-faktor lain seperti sumber daya alam, sarana maupun prasarana yang memadai.

Dari segi partisipasi masyarakat, masyarakat yang berpendidikan akan berbeda tingkat partisipasinya dengan masyarakat yang kurang berpendidikan, biasanya masyarakat yang berpendidikan akan cenderung bersikap aktif dan mendorong adanya pembangunan. Berbeda dengan masyarakat yang kurang berpendidikan biasanya mereka cenderung bersikap pasif dan menunggu perintah pimpinan setempat.

Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kelurahan Tirtomoyo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Keadaan penduduk menurut pendidikan usia 5 tahun ke atas di Kelurahan Tirtomoyo tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak tamat SD	8	0,1
2.	Tamat SD	2446	42,7
3.	Tamat SLTP	1945	34
4.	Tamat SLTA	630	11
5.	Tamat Diploma	18	0,3
6.	Tamat Sarjana	16	0,2

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Tirtomoyo dapat dikatakan baik, walaupun masih ada penduduk yang tidak sekolah, dikarenakan penduduk yang umumnya tidak sekolah tersebut adalah penduduk yang berusia di atas 60 tahun.

b. Agama

Dari 5693 orang penduduk Kelurahan Tirtomoyo sebagian besar beragama Islam, sehingga kegiatan keagamaan sangat kental. Kegiatan tersebut antara lain sholat berjamaah di masjid dilanjutkan dengan ceramah pengajian baik anak-anak maupun orang dewasa serta adanya Taman Pendidikan Al Qur'an 5 buah. Bagi yang beragama Kristen diadakannya kegiatan Pemahaman Alkitab. Sebagai penunjang sarana peribadatan di Kelurahan Tirtomoyo terdapat 10 buah masjid, 6 mushola dan 1 gereja.

c. Kesehatan

Selain faktor pendidikan dan agama, faktor kesehatan juga berpengaruh terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, khususnya berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, diperlukan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Di Kelurahan Tirtomoyo sarana kesehatan yang ada sebagai berikut :

Tabel 4. Sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Tirtomoyo tahun 2023

No	Sarana kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Polindes	1
3.	Bidan Swasta	1
4.	Posyandu	8

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh mata pencaharian rata-rata yang dimiliki oleh penduduknya. Di Kelurahan Tirtomoyo yang secara umum daerahnya masih terdiri dari persawahan dan ladang akan berdampak pada besarnya penduduk yang berprofesi sebagai petani, namun selain dari sektor pertanian masih terdapat banyak potensi yang ditekuni oleh warga masyarakat Kelurahan Tirtomoyo.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Tirtomoyo cukup baik, karena didukung keadaan tanahnya cukup subur. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan tabel mengenai penggolongan penduduk menurut mata pencaharian.

Tabel 5. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian di Kelurahan Tirtomoyo tahun 2023.

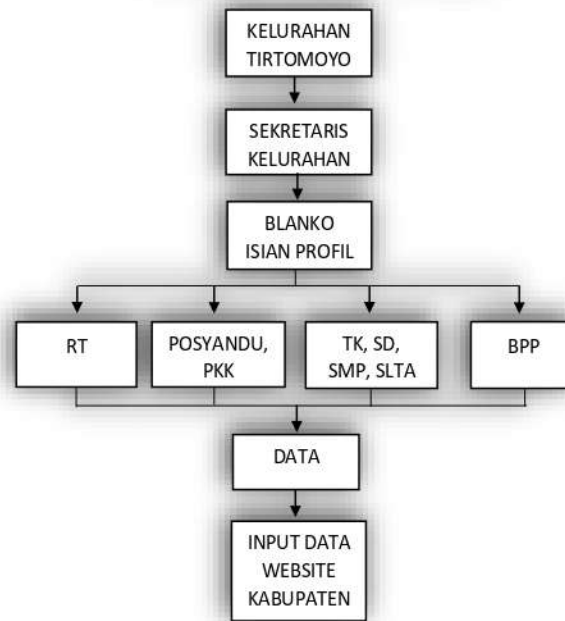
No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Petani sendiri	767	58,857
2.	Buruh tani	25	1,853
3.	Nelayan	-	-
4.	Buruh industri	111	8,228
5.	Buruh bangunan	210	15,567
6.	Usaha industri	4	0,297
7.	Pedagang	52	3,855
8.	Usaha jasa	30	2,224
9.	Pegawai swasta	12	0,890
10.	Pegawai Negeri Sipil	51	3,781
11.	Pensiunan	16	1,186
12.	Lain-lain	71	5,263

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian serta melihat permasalahan tersebut, Kelurahan Tirtomoyo mengambil suatu langkah agar pemenuhan data profil dapat terlaksana dengan cepat dan valid. Adapun langkah yang diambil yaitu dengan melibatkan instansi instansi yang ada diantaranya Rukun Tetangga (RT), Kader Pos Pelayanan Terpadu (Kader Posyandu), Balai Penyuluh Pertanian (BPP ), dan tempat tempat pendidikan seperti Taman Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Gambar 2. Mekanisme Validasi dan Pemenuhan Data Profil Kelurahan

## MEKANISME VALIDASI DAN PEMENUHAN DATA PROFIL KELURAHAN



Dalam hal ini Lurah memerintahkan kepada Sekretaris Kelurahan untuk membuat blanko isian yang ditujukan kepada instansi instansi tersebut sesuai kebutuhan data yang diperlukan. Kemudian dengan batas waktu yang ditentukan instansi instansi tersebut supaya menyetorkan data ke kelurahan. Dengan demikian maka akan diperoleh data secara cepat dan valid. Selain itu pelaporan data dari instansi diminta secara rutin setiap awal tahun, agar setiap ada perubahan dapat di akses. Setelah data terkumpul petugas di Kelurahan akan mengakses di website yang sudah tersedia. Dengan inovasi ini profil Kelurahan Tirtomoyo bias terpenuhi secara valid.

### A. Mekanisme Validasi Dan Pemenuhan Data Profil Kelurahan

#### 1. Data Profil Kelurahan

Profil desa dan kelurahan terdiri atas data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Data dasar keluarga berisikan gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi:

- a. potensi sumber daya manusia;
- b. perkembangan kesehatan;



- c. perkembangan pendidikan;
- d. penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga;
- e. partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga; dan
- g. perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Data dasar keluarga digunakan sebagai data dasar perhitungan perkembangan kualitas manusia Indonesia yang dikembangkan melalui RIAD.

#### **A. Potensi Desa dan Kelurahan**

Potensi desa dan kelurahan terdiri atas data sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana. Data sumber daya alam meliputi:

- a. potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah dan letak;
- b. pertanian;
- c. perkebunan;
- d. kehutanan;
- e. peternakan;
- f. perikanan;
- g. bahan galian;
- h. sumber daya air;
- i. kualitas lingkungan;
- j. ruang publik/taman; dan
- k. wisata.

Data sumber daya manusia meliputi:

- a. jumlah;
- b. usia;
- c. pendidikan;
- d. mata pencaharian pokok;
- e. agama dan aliran kepercayaan;

- f. kewarganegaraan;
- g. etnis/suku bangsa;
- h. cacat fisik dan mental; dan
- i. tenaga kerja.

Data sumber daya kelembagaan meliputi:

- a. lembaga pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- c. lembaga social kemasyarakatan;
- d. organisasi profesi;
- e. partai politik;
- f. lembaga perekonomian;
- g. lembaga pendidikan;
- h. lembaga adat; dan
- i. lembaga keamanan dan ketertiban.

Data prasarana dan sarana meliputi:

- a. transportasi;
- b. informasi dan komunikasi;
- c. prasarana air bersih dan sanitasi;
- d. prasarana dan kondisi irigasi;
- e. prasarana dan sarana pemerintahan;
- f. prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan;
- g. prasarana peribadatan;
- h. prasarana olah raga;
- i. prasarana dan sarana kesehatan;
- j. prasarana dan sarana pendidikan;
- k. prasarana dan sarana energi dan penerangan;
- l. prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan
- m. prasarana dan sarana kebersihan.

Data potensi desa dan kelurahan dilakukan pengukuran dan analisis untuk menentukan tingkatan potensi umum, potensi pengembangan dan tipologi desa dan kelurahan.

Tingkatan potensi umum terdiri atas:

- a. potensi tinggi (jika skor total mencapai nilai lebih dari 80% dari skor nilai maksimal)
- b. potensi sedang (jika skor total mencapai nilai antara 60% sampai 80% dari skor nilai maksimal)
- c. potensi rendah (jika skor total mencapai nilai kurang dari 60% dari skor nilai maksimal)

Potensi pengembangan terdiri atas:

- a. Sangat Potensial Dikembangkan jika perolehan skor indikator lebih dari 80% dari skor maksimal dari potensi yang diukur;
- b. Potensial Dikembangkan jika perolehan skor indikator antara 70% sampai 80% dari skor maksimal dari potensi yang diukur;
- c. Cukup Potensial Dikembangkan jika perolehan skor indikator antara 60 sampai 70% dari skor maksimal dari potensi yang ukur;
- d. Kurang Potensial Dikembangkan jika perolehan skor indikator kurang dari 60% dari skor maksimal dari potensi yang diukur.

Hasil scoring potensi umum dan potensi pengembangan menentukan tipologi desa dan kelurahan. Tipologi desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Tipologi desa dan kelurahan persawahan;
- b. Tipologi desa dan kelurahan perladangan;
- c. Tipologi desa dan kelurahan perkebunan;
- d. Tipologi desa dan kelurahan peternakan;
- e. Tipologi desa dan kelurahan nelayan;
- f. Tipologi desa dan kelurahan pertambangan/galian;
- g. Tipologi desa dan kelurahan kerajinan dan industri kecil;
- h. Tipologi desa dan kelurahan industri sedang dan besar; dan
- i. Tipologi desa dan kelurahan jasa dan perdagangan.

## **B. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan**

Tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan setiap tahun dan setiap lima tahun diukur dari laju kecepatan perkembangan:

- a. ekonomi masyarakat;
- b. pendidikan masyarakat;
- c. kesehatan masyarakat;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. kedaulatan politik masyarakat;
- f. peranserta masyarakat dalam pembangunan;
- g. lembaga kemasyarakatan;
- h. kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

## **2. Penyusunan Profil Kelurahan**

Penyusunan profil desa dan kelurahan meliputi kegiatan:

- a. penyiapan instrumen pengumpulan data;
- b. penyiapan kelompok kerja profil desa/kelurahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan data;
- d. pengolahan data; dan
- e. publikasi data profil desa dan kelurahan.

Instrumen pengumpulan data profil desa dan kelurahan terdiri daftar isian data dasar keluarga, daftar isian potensi desa dan kelurahan serta daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan profil desa dan kelurahan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi.

## **C. Tingkat Desa / Kelurahan**

- a. Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh kelompok kerja (Pokja) profil desa dan kelurahan di tingkat desa dan kelurahan.
- b. Susunan Pokja profil desa dan kelurahan terdiri dari: penanggungjawab adalah Kepala Desa/Lurah, ketua dijabat oleh Sekretaris Desa/Kelurahan; dan anggota terdiri dari perangkat desa/kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan para kader pemberdayaan masyarakat serta aparat perangkat daerah yang ada di desa/kelurahan dan kecamatan.
- c. Pokja profil desa dan kelurahan ditetapkan oleh kepala desa/lurah melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.

#### **D. Tingkat Kecamatan**

- a. Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan di kecamatan dilaksanakan oleh Pokja profil desa/kelurahan tingkat kecamatan.
- b. Susunan profil desa dan kelurahan terdiri dari: penanggungjawab adalah Camat, ketua dijabat oleh Sekretaris Kecamatan; dan anggota terdiri dari unsur aparat perangkat kecamatan dan daerah yang ada di tingkat kecamatan.
- c. Pokja profil desa dan kelurahan tingkat kecamatan ditetapkan melalui Keputusan Camat.

#### **E. Tingkat Kabupaten / Kota**

- a. Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pokja profil desa/kelurahan tingkat kabupaten/kota.
- b. Pokja profil desa dan kelurahan di tingkat kabupaten/kota memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.

- c. Susunan Pokja profil desa dan kelurahan terdiri dari: penanggungjawab adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten/kota; ketua dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani profil desa dan kelurahan; dan anggota terdiri dari perwakilan unit kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten/kota.
- d. Pembentukan Pokja profil desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota.

#### **F. Tingkat Provinsi**

- a. Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Pokja profil desa/kelurahan tingkat provinsi.
- b. Pokja profil desa dan kelurahan di tingkat provinsi memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan tingkat provinsi.
- c. Susunan Pokja profil desa dan kelurahan terdiri dari: penanggungjawab adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi, ketua dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani profil desa dan kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi, dan anggota terdiri dari perwakilan unit kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat provinsi.
- d. Pembentukan Pokja profil desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Sumber informasi dalam pengumpulan data profil desa dan kelurahan adalah kepala keluarga, pengurus RT, pengurus RW, kepala dusun, kepala lingkungan, kepala desa, lurah dan perangkat desa dan kelurahan, pengurus TP-PKK dan lembaga kemasyarakatan serta unit pelaksana teknis satuan kerja perangkat daerah dan perangkat pusat yang ada di desa, kelurahan dan kecamatan.

- a. Kegiatan pengolahan data profil desa dan kelurahan dilaksanakan secara berjenjang, dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota sampai tingkat provinsi.
- b. Data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang telah dikumpulkan, diolah oleh Pokja profil desa dan kelurahan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
- c. Pengolahan data dasar keluarga, potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan menggunakan alat bantu program aplikasi profil desa dan kelurahan serta profil RIAD (software), alat pengolah data (hardware) serta dukungan sumber daya manusia (brainware) yang ditetapkan menurut standar nasional.
- d. Pengolahan data profil desa dan kelurahan dilaksanakan melalui klarifikasi, tabulasi, kompilasi dan rekapitulasi baik melalui program aplikasi maupun secara manual.

Hasil pengolahan data profil desa dan kelurahan berupa data tentang:

- a. Kualitas ibu dan anak di tingkat dusun dan lingkungan hasil RIAD;
- b. Tingkatan potensi umum desa dan kelurahan;
- c. Potensi pengembangan desa dan kelurahan;
- d. Tipologi pengembangan desa dan kelurahan sesuai potensi unggulan;
- e. Laju perkembangan desa dan kelurahan;
- f. Klasifikasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan;
- g. Kategori status kemajuan desa dan kelurahan;
- h. Permasalahan kualitas keluarga, tingkatan potensi umum, factor pembatas pengembangan potensi dan laju perkembangan, tingkat dan kategori perkembangan desa dan kelurahan; dan
- i. Indikasi program pembangunan desa dan kelurahan tahun selanjutnya.

#### **G. Publikasi Data Profil Desa / Kelurahan**

Data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan disajikan dalam bentuk hardcopy seperti buku dan papan profil desa dan kelurahan serta bentuk softcopy seperti compact disc room, flash disc atau audio video



agar mudah diakses oleh seluruh pelaku pembangunan desa dan kelurahan dari tingkat masyarakat sampai dunia usaha dan institusi pemerintahan pada berbagai tingkatan.

- a. Data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan di tingkat desa dan kelurahan disahkan dan dipublikasikan oleh Kepala Desa dan Lurah melalui Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah.
- b. Data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan di tingkat kecamatan disahkan dan dipublikasikan oleh camat melalui Keputusan Camat.
- c. Data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan di tingkat kabupaten/kota disahkan dan dipublikasikan oleh Bupati/Walikota melalui Keputusan Bupati/Walikota.
- d. Data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan di tingkat provinsi disahkan dan dipublikasikan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur.

Publikasi data profil desa dan kelurahan dilaksanakan melalui surat dinas, publikasi media cetak dan elektronik, publikasi digital website dan teknologi informasi pemerintahan lainnya.

Data profil desa dan kelurahan yang dipublikasikan kabupaten/kota dan provinsi didistribusikan kepada seluruh pelaku pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kepada pemerintah pada berbagai tingkatan mulai dari desa, kelurahan dan kecamatan sampai pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta pihak lain yang berkepentingan untuk didayagunakan sesuai kebutuhan masing-masing.

#### **H. Siklus Data Profil Desa / Kelurahan**

- a. Daftar isian data dasar keluarga diisi oleh kepala keluarga dan diserahkan kepada Pokja profil desa dan kelurahan pada bulan Agustus sampai September.

- b. Daftar isian data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan diisi oleh Pokja profil desa dan kelurahan pada bulan Oktober.
- c. Pengolahan data profil desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan November.
- d. Publikasi data profil desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan Desember.

Pengumpulan, pengolahan dan publikasi data potensi desa dan kelurahan dilaksanakan setiap tiga tahun sedangkan data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan dilakukan setiap tahun dan setiap lima tahun.

Gambar 2. Model Poster HKI



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Profil desa dan kelurahan sebagai gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. Agar pemenuhan data profil dapat terlaksana dengan cepat dan valid, Kelurahan Tirtomoyo melaksanakan inovasi kegiatan. Adapun langkah yang diambil yaitu dengan melibatkan instansi instansi yang ada diantaranya RukunTetangga (RT), Kader Pos PelayananTerpadu (Kader Posyandu), Balai PenyuluhPertanian (BPP ), dan tempat tempat pendidikan seperti Taman Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Dalam hal ini Lurah memerintahkan kepada Sekretaris Kelurahan untuk membuat blanko isian yang ditujukan kepada instansi instansi tersebut sesuai kebutuhan data yang diperlukan. Kemudian dengan batas waktu yang ditentukan instans iinstans itersebut supaya menyetorkan data ke kelurahan. Dengan demikian maka akan diperoleh data secara cepat dan valid.

#### **B. Saran**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama, yaitu tentang pemenuhan data profil kelurahan. Kedepannya pemerintah kelurahan harus tetap aktif dalam pengumpulan data dan pemberian informasi di laman profil kelurahan, supaya apa yang telah dilakukan validasi memberikan kemanfaatan dan berguna kedepannya.